

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA PADA KETENTUAN DIBERLAKUKAN SURUT (*RETROACTIVE*) TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

(Kajian Yuridis Terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu
Anggota DPD Tahun 2019)

Oleh

RANDY AGUS SETIAWAN

Pengaturan keberlakuan surut (*retroactive*) terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup panjang antara boleh atau tidaknya diberlakukan. Hukum Pidana Indonesia mengatur bahwa keberlakuan surut tidak diperbolehkan, faktanya terdapat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan surut seperti Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketentuan diberlakukan surut (*retroactive*) apakah boleh berlaku berdasarkan sudut pandang Hukum Tata Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa keberlakuan surut secara konstitusional tidak selaras dengan UUD 1945, namun diperbolehkan sepanjang pengaturan ketentuan retroaktifnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang, dan apabila memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidananya tidak ikut diberlakusurutkan. Selain itu, urgensi diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 secara surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 adalah didasarkan atas validitas norma dan hierarki norma, bahwa norma yang lebih tinggi menjadi dasar dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karenanya, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 merupakan norma yang menjadi dasar Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019.

Kata Kunci: Keberlakuan surut (*retroactive*), Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL LAW ON PROVISIONS THAT ARE APPLIED RETROACTIVELY (RETROACTIVE) TO THE MATERIAL CONTENT OF LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA

(Juridical Study Of The General Election Commission Regulation Number 26 of 2018 in The 2019 General Election Of Members Of The Regional Representative Council)

By

RANDY AGUS SETIAWAN

The Regulation of the Retroactive application of the material content of laws and regulations in Indonesia has a fairly long dynamic between whether or not it is allowed to be enforced. Indonesian criminal law stipulates that retroactive applied is not allowed, in fact there are laws and regulations that are retroactively enforced like General Election Commission Regulation Number 26 of 2018. The research objective is to analyze retroactively enforced provisions whether they can apply from the perspective of constitutional law. This research is normative legal research by conducting a review of General Election Commission Regulation Number 26 of 2018, using a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study concluded that retroactively is constitutionally contrary to constitution, however it is permissible as long as the retroactive provisions are regulated further in the law and if it contains criminal provisions, the criminal provisions aren't applied retroactively. In addition, the urgency of implementing Election Commission Regulation Number 26 of 2018 is based on the validity of norms and a hierarchy of norms, that higher norms become the basis for determining the application of lower statutory regulations. Therefore, the decision of the constitutional court number 30/PUU-XVI/2018 is the norm which forms the basis for the retroactive effect of the General Election Commission Regulation Number 26 of 2018 on participants in the 2019 regional representative council election.

Keywords: Retroactive Behavior (retroactive), Legislation.